



KR-Mulyawan

Wakil Bupati Boyolali, Wahyu Irawan secara simbolis menyerahkan wayang.

Pemkab Boyolali Gelar Pentas Wayang Kulit

BOYOLALI (KR) - Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Boyolali menggelar pagelaran wayang kulit Bharatayuda selama 7 malam berturut-turut di Gelanggang Anuraga Boyolali.

Kepala Disdikbud Boyolali, Supana mengatakan pagelaran wayang kulit Bharatayuda oleh 7 dalang ini diawali pada mulai Selasa (3/12) hingga Senin (9/12). "Pagelaran wayang kulit Bharatayuda ini adalah agenda rutin tahunan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang digelar sebagai cara atau strategi menguri-uri atau melestarikan budaya Jawa dengan menghadirkan 7 dalang," kata Supana. Di Kabupaten Boyolali ini ada banyak sekali dalang wayang kulit, jumlahnya mencapai 97 dalang. Pada acara kali ini akan menampilkan 7 dalang senior.

Pada Selasa (3/12) menampilkan Dalang Ki Gondo Waroyo dengan lakon Kresna Duta. Rabu (4/12) menampilkan Ki Harsono Kuproh dari Kecamatan Wonosegoro dengan lakon Bisma Gugur. Kamis (5/12) menampilkan Ki Raharjo dr Kecamatan Sambu dengan lakon Abimanyu Gugur. Jumat (6/12) menampilkan Ki Suryanto Purbo Carito dari Karang Gede dengan lakon Suluhun Gatutkaca gugur. Sabtu (7/12) menampilkan Ki Warjito Kliwir dari Ngemplak, dengan lakon Durna Gugur. Minggu (8/12) menampilkan Ki Heri Karianto dari Klego dengan lakon Karna Tanding. Senin (9/12) menampilkan Ki Setyo Margono dari Kecamatan Musuk dengan lakon Duryudana Gugur.

Sementara itu, Dalang Ki Gondo Waroyo mengaku senang bisa terlibat dalam acara pagelaran wayang kulit Bharatayuda selama 7 malam yang digelar oleh Disdikbud Kabupaten Boyolali. (Mul)-f

PLN Sukses Jaga Keandalan Listrik Selama Pilkada

SEMARANG (KR) - Jelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT PLN (Persero) lakukan serangkaian persiapan. Hal ini justru dipersiapkan juga dalam event nasional yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota belum lama ini. PLN telah menyiapkan 4.071 personel untuk menjaga keamanan pasokan listrik dan pastikan kelancaran Pilkada Serentak 2024 kemarin.

Salah satunya daerah pemilihan tersebut adalah Pilkada di Provinsi Jateng dan 23 Kota/ Kabupaten di Jateng, serta 5 Kota/ Kabupaten di DIY. PLN tetapkan masa siaga sejak sebelum dimulainya debat pertama pada tanggal 29 Oktober hingga selesainya pelaksanaan Rekapitulasi Pilkada pada 30 November 2024 di 738 lokasi siaga tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jateng dan DIY.

Handi Tri Ujiono, SSos selaku Ketua KPU Provinsi Jateng menyampaikan apresiasinya atas langka yang dilakukan PLN dalam menyelesaikan event nasional tersebut. "Kami berterima kasih kepada PLN yang telah menyelesaikan event tingkat nasional ini. Di Jateng ini sudah berjalan lancar tanpa kendala," ungkap Handi. General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY, Sugeng Widodo menyampaikan pihaknya telah berkomitmen tidak ada pemadaman pada saat masa siaga berlangsung kecuali kondisi emergency. (Cha)-f

Lapas Magelang Adakan Pelatihan



KR-Thoha

Kepala Lapas Magelang dan Kasi Kegiatan Kerja berada di lokasi budidaya ternak unggas.

MAGELANG (KR) - LP Kelas IIA Magelang atau Lapas Magelang di tahun 2024 memperoleh 4 kali pelatihan dalam Tahun Anggaran 2024, ada 4 keterampilan yang disampaikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Magelang. Dalam setiap pelatihan diikuti 40 peserta.

Demikian dikemukakan Kasi Kegiatan Kerja Lapas Magelang Endhi Subianto kepada KR, Rabu (4/12). Dikatakan, untuk gelombang pertama dilaksanakan pelatihan pangkas rambut (barber) dan pembuatan tempe, yang dilaksanakan pada Bulan Maret dan Bulan April 2024 lalu. Pada Bulan Agustus 2024 dilaksanakan pelatihan unggas, dan pelatihan Katak Bullfrog atau Katak Lembu Amerika.

Untuk katak, angka ke-

matianya sangat kecil. Setelah dilakukan pelatihan, dicoba dengan 1.000 anak katak (percil) yang harga setiap anak katak Rp 3 ribu. Perkiraan hingga panen, pakannya sekitar Rp 2 juta. Bulan Januari 2025 mendatang perkiraan panen, angka kematiannya sangat kecil. Saat panen, untuk setiap kilogramnya berisi 4 ekor katak. Harga jual sekitar Rp 40 ribu/Kg. Dibanding dengan ternak ikan lele, yang sudah dicoba sebelumnya, angka kematian katak lebih kecil. Dari 1.000 ekor, perkiraan panen mencapai sekitar 200 Kg.

Pelatihan Katak Bullfrog ini, lanjut Endhi, kemungkinan belum banyak Lapas yang membudidayakan. Atau mungkin baru dilaksanakan di Lapas Magelang. Diharapkan hal ini dapat memberikan wa-

Purworejo Raih Penghargaan Kepatuhan Ombudsman RI

PURWOREJO (KR) - Kabupaten Purworejo berhasil meraih Penghargaan Kepatuhan dari Ombudsman RI Tahun 2024. Piagam penghargaan diserahkan langsung Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jateng, Siti Farida SH MH di Hotel Quest Semarang baru-baru ini. Pemkab Purworejo masuk kategori zona hijau dengan nilai 97,35 sebagai Opini Kualitas Tertinggi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan nilai tersebut, Pemkab Purworejo menduduki peringkat 14 tingkat Provinsi Jawa Tengah dan peringkat 26 tingkat Nasional.

Siti mengatakan, Jawa Tengah telah mendominasi penilaian nasional, penyebabnya adalah ada kolaborasi dan kinerja yang sangat baik dari seluruh penyelenggara pelayanan publik di Jawa Tengah. Bahkan Tahun 2024 ini, seluruh kabupaten/kota di

Jateng sudah lulus mendapatkan nilai A dan itu hanya di Jateng. "Hasil ini betul-betul buah dari kerja keras seluruh pejabat publik di Jateng. Harapan kedepan, Jawa Tengah semakin baik bisa melayani masyarakat dengan lebih optimal," ucapnya.

Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti menjelaskan, tahun 2023 Pemkab Purworejo sudah masuk kategori zona hijau dengan nilai 94,41 dan meraih peringkat 11 tingkat Provinsi Jawa Tengah serta peringkat 38 tingkat Nasional. Artinya ada peningkatan peringkat di tingkat nasional yang menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan. "Saya sangat senang Kabupaten Purworejo meraih penghargaan ini. Meskipun terjadi penurunan peringkat dari tahun sebelumnya, namun nilainya naik cukup tinggi. Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan publik kita

meningkat," jelasnya.

Menurutnya, dengan raih penghargaan ini, kerjasama dan sinergitas dari seluruh stakeholder harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Penghargaan yang berhasil didapat, bisa dijadikan motivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

"Ini merupakan hal yang positif, namun saya minta kita tidak cepat berpuas diri. Jadikan ini motivasi untuk lebih baik lagi dalam melayani dan terus berupaya mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Kepala Bagian Organisasi, Setda Kabupaten Purworejo, Dwita Puspitasari Novebrianti SH menambahkan, Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini merupakan tahun terakhir penyelenggaraannya dan digantikan dengan opini pelayanan publik.

"Tadi sudah dilakukan pembentukan Jaringan

Pengawasan Pelayanan Publik (Focal Point). Ini upaya nyata optimalisasi pengelolaan pengaduan yang mengandalkan kecepatan dalam menindaklanjuti laporan yang masuk ke Ombudsman. Purworejo siap untuk melaksanakannya," imbuhnya.

Secara khusus, sambung Dwita, pihaknya berterimakasih kepada seluruh perangkat daerah, khususnya bagi Dinas Pen-

didikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (Din-sosdalkub KB), Puskesmas Loano dan Puskesmas Kemiri yang telah menjadi locus penilaian. (*-5)-f



KR-Istimewa

Penerimaan Piagam Penghargaan Pengu-gerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024.

WMS Voucher Kebutuhan Internet Pelaku Usaha

SEMARANG (KR) - Transformasi teknologi dan layanan internet yang berkembang pesat membuka peluang baru bagi para pelaku bisnis untuk meningkatkan profit usaha. Tingginya kebutuhan masyarakat akan internet, mendorong PT Telkom Indonesia (Telkom) untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan meluncurkan produk Wi-Fi Managed Service berbasis Voucher WMS Voucher).

Demikian dikatakan Executive General Manager Digital Connectivity Service Teuku Muda Nanta di Semarang, Rabu (4/12). WMS Voucher merupakan pengembangan dari Wifi.id Managed Service yang dirancang khusus untuk para institusi dan pelaku bisnis di segmen Small Medium Enterprise (SME), Small Medium Business (SMB), dan Large Enterprise dengan cakupan layanan nasional, yang mampu menjangkau seluruh wilayah tanpa adanya pembatasan klaster regional.

Menurut Teuku Muda, WMS Voucher beda dengan produk WMS sebelumnya. Produk baru ini mengadopsi sistem berbasis voucher yang dapat dikelola secara mandiri oleh pemilik venue sesuai ke-

butuhan bisnisnya. WMS Voucher juga menawarkan biaya lebih terjangkau dengan limited user, tanpa mengurangi kualitas unggulannya. Voucher yang dihasilkan dapat dijual kembali kepada end user sebagai Point of Sales System (POS)

pelanggan.

WMS Voucher turut memberikan fleksibilitas kepada pelanggan untuk melakukan deactivation dan dapat dengan mudah mengaktifkannya kembali sebagai pengguna baru selama akun tersebut tidak ditangguhkan akibat

tunggakkan pembayaran.

"Untuk memperluas potensi pelanggan, kami telah melakukan sosialisasi ke beberapa instansi pendidikan, salah satunya Sekolah Al-Azhar Medan dan juga beberapa pelaku bisnis food and beverage," tutur Teuku Muda Nanta.

Teuku mengatakan Telkom berkomitmen dalam mewujudkan layanan produk terbaik yang berkualitas, juga menyediakan prosedur pengaduan yang mudah dan responsif untuk memberikan penga-

laman pelanggan yang memuaskan. Pelanggan yang mengalami gangguan layanan terkait WMS Voucher dapat langsung menghubungi Sales Assistant yang bertanggung jawab mengakses layanan customer care, atau dapat juga melalui akun media sosial resmi Tenesa Telkom, seperti Instagram, Facebook, dan X. Dapatkan WMS Voucher, dengan menghubungi Sales Representative Telkom terdekat atau melalui call center 1500250. (Bdi)-f

RESES ANGGOTA DPRD SALATIGA 2024

Optimalisasi Kader ILP, Trotoar, Kompensasi Warga Sekitar TPA Ngronggo Minta Diperhatikan

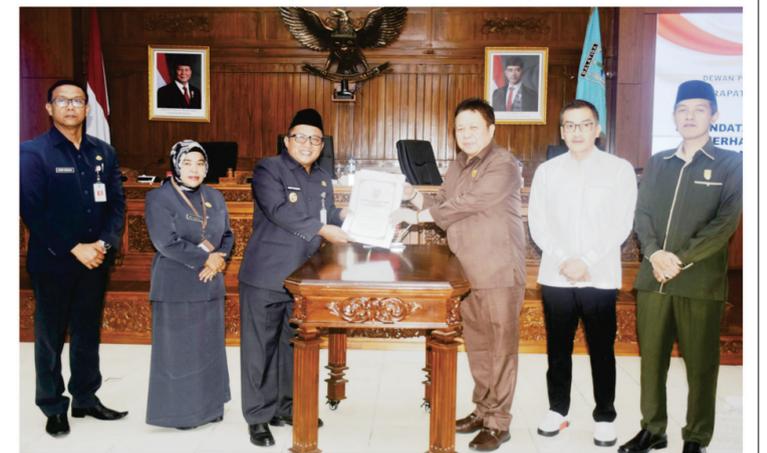


Reses menjadi sebuah jembatan periodik bagi wakil rakyat baik di DPRD, DPRD Provinsi maupun DPRD RI.

Demikian halnya dengan anggota DPRD Salatiga periode 2024-2029. Sejak dilantik pada Agustus 2024 lalu, sebanyak 25 anggota dewan telah menjalankan tugasnya melalui anggaran 2024 khususnya di perubahan APBD.

Salah satu kegiatan bertemu dengan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) dan ini yang disebut reses.

Di Kota Salatiga pada Pileg



Pimpinan DPRD Kota Salatiga bersama Pj Wali Kota Salatiga menunjukkan Dokumen Perse-tujuan Raperda APBD Tahun 2025

Bidang Kesehatan

Reses anggota Fraksi PDI Perjuangan, Bagas Aryanto lebih fokus pada Integrasi Layanan Primer (ILP) dengan reses peserta 100 orang kader ILP. Menurutnya, pemerintah harus hadir lebih serius di program yang secara nyata sudah memunculkan partisipasi masyarakat di setiap giat ILP.

ILP dari hasil penyerapan aspirasi, perlu dioptimalkan dengan Pemenuhan sarana pelayanan kesehatan, Pembinaan Kader yang hampir di setiap kewilayahan itu antusias dan bersemangat, kemudian Peningkatan kapasitas kader ini lebih kepada upaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelatihan kesehatan.

Sebagai catatan partisipasi dan semangat dari para kader kesehatan di wilayah luar biasa, bahkan dalam batas tertentu mereka nombok sehingga pada kesempatan audiensi melalui giat reses kemarin, para kader di Banjaran Salatiga ada istilah Pelita (Pegawai Lillahtita'ala).

Sementara itu di daerah Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, dari reses anggota dewan, me-

nemukan usulan warga yang lebih krusial, yakni di permukaan yang berdekatan dengan tempat lubang sampah akhir (TPA) Ngronggo.

Warga di sekitar meminta agar sarana prasarana dibenahi kembali karena dampak lubang sampah yang terkadang menutup saluran air dan berdampak bagi warga sekitar.

"Warga meminta agar sarana di kawasan ini lebih diperhatikan dan diulaskan perbaikan, karena dampak sampah," ujar salah seorang anggota DPRD Salatiga, Dapil 4 Argomulyo.

Sedangkan di Dapil 3 Tingkat cenderung masyarakat minta perbaikan jalan perkampungan dan tempat ibadah. Hal ini disampaikan anggota Fraksi PKS, Nono Rohana saat reses. Menurutnya warga minta jalan masuk ke salah satu masjid di Tingkat Tengah untuk dibenahi.

Dapil 2 Kecamatan Sidorejo, masih pada permintaan pembangunan lingkungan warga yang menjadi prioritas permintaan warga masyarakat.

(Advertorial/Humas DPRD Kota Salatiga)



Salah satu masyarakat menyampaikan aspirasi dalam forum Reses DPRD

lalu, terdapat 4 daerah pemilihan (Dapil), yakni Dapil 1 Kecamatan Sidomukti, Dapil 2 Kecamatan Sidorejo, Dapil 3 Kecamatan Tingkir dan Dapil 4 adalah wilayah Kecamatan Argomulyo.

Setiap dapil memiliki perwakilan anggota dewan menyesuaikan dengan jumlah kursi. Dari empat dapil di atas, satu dapil yakni Kecamatan Sidorejo memiliki 7 kursi di DPRD Salatiga, sedangkan tiga lainnya dijatah 6 kursi, sehingga jumlah anggota DPRD di Salatiga sebanyak 25 orang.

Reses kedua 2024 DPRD Salatiga dilaksanakan pada November lalu dengan tujuan untuk menyerap aspirasi warga masyarakat yang diwakili dan hasil penyerapan dibawa oleh setiap anggota DPRD ke tingkat lebih tinggi dijadikan bahan pertimbangan dalam rapat baik di komisariat maupun fraksi atau dengan lembaga eksekutif untuk menentukan arah pembangunan baik fisik maupun sumber daya manusia.

Lalu apa saja yang didapat

masyarakat yang mereka dapatkan mulai urusan pembangunan saluran limbah kesehatan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Selain itu juga bermunculan usulan perbaikan sarana prasarana hingga perbaikan jalan di kampung.

Wakil Ketua DPRD Salatiga, Yuliyanto mengungkapkan saat dirinya reses banyak aspirasi dari masyarakat baik fisik dan non fisik. Diantaranya usulan tentang pembangunan trotoar di lokasi belak-pagar pagar tembok kantor wali kota (Jalan Merbabu).

Warga meminta menutup saluran dan di atasnya dibuat trotoar dari SPBU Jalan Brigjen Sudiarso sampai tembus ke Toko Roti Wonder di Jalan Semeru. Kemudian di diskusikan dengan DPU Salatiga, kalau dibangun trotoar akan mengurangi lebar jalan yg tersedia. "Sehingga saat ini diperlukan adanya solusi untuk membuat jalan tersebut menjadi satu arah," kata Yuliyanto.



Ketua DPRD Kota Salatiga saat menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada Forum Musrenbang Kota Salatiga tahun 2025